

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR, KOTA PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

¹**M. Aji Andika**

¹Program Studi Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri Palembang

Email: ¹majiandika1@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Makan Bergizi Gratis; implementasi kebijakan; Maqashid Syariah; Good Governance; Kota Palembang.

Cara Sitasi:

Penulis, M. Aji Andika. "Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*." *Currency (Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah)* [Volume 05, Nomor 01](#) Oktober 2026

ABSTRACT

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan pemerintah sebagai upaya strategis mengatasi masalah gizi, termasuk stunting, yang masih menjadi tantangan nasional maupun daerah dalam rangka mendukung visi Indonesia Emas 2045. Data Kementerian Kesehatan RI (2022) mencatat prevalensi stunting nasional mencapai 21,6%, atau sekitar satu dari lima anak Indonesia masih mengalami masalah gizi kronis, sehingga intervensi kebijakan berbasis gizi menjadi mendesak untuk dikaji efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program MBG di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, serta mengevaluasinya dari perspektif *Maqashid Syariah*, khususnya pada aspek keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (maslahah), amanah, dan transparansi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kecamatan Alang-Alang Lebar pada tahun 2026. Data primer dikumpulkan melalui observasi nonpartisipatif, wawancara semi terstruktur terhadap sembilan informan lintas pemangku kepentingan, dan dokumentasi lapangan, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MBG di Kecamatan Alang-Alang Lebar berjalan secara sistematis melalui lima tahapan perencanaan menu, produksi dan higienitas, distribusi, konsumsi dan pendampingan, serta monitoring dan evaluasi dan telah memenuhi kelima dimensi *Maqashid Syariah* (*hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal*) pada tingkat dharuriyyat. Meskipun demikian, implementasi program masih menghadapi tantangan operasional berupa kendala logistik dan jarak distribusi, fluktuasi harga bahan baku, sosialisasi pada tahap awal pelaksanaan, serta koordinasi antarlembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program MBG memberikan dampak berganda (*multiplier effect*) terhadap aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi rumah tangga, dan nilai keagamaan masyarakat, serta merekomendasikan penguatan manajemen logistik, koordinasi lintas lembaga, dan pendataan yang lebih akurat.

The Free Nutritious Meal Program (Program Makan Bergizi Gratis/MBG) was launched by the Indonesian government as a strategic effort to address nutritional problems, including stunting, which remain a significant challenge at both the national and regional levels in support of the Golden Indonesia 2045 vision. The Indonesian Ministry of Health (2022) reported a national stunting prevalence of 21.6%, meaning approximately one in five Indonesian children still experiences chronic nutritional problems, underscoring the urgency of evaluating nutrition-based policy interventions. This study aims to analyze the implementation of the MBG Program in Alang-Alang Lebar Subdistrict, Palembang City, and to evaluate it from the perspective of Maqashid Syariah, particularly the principles of justice (al-'adl), public benefit (maslahah), trustworthiness (amanah), and transparency. The study employs a descriptive qualitative approach through field research conducted in Alang-Alang Lebar Subdistrict in 2026. Primary data were collected through non-participatory observation, semi-structured interviews with nine informants across stakeholder groups, and field documentation, then analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña (2014), comprising data condensation, data display, and conclusion drawing/verification. The results show that the implementation of the MBG Program in Alang-Alang Lebar proceeds systematically through five stages menu planning, production and hygiene, distribution, consumption and mentoring, and monitoring and evaluation and fulfills all five dimensions of Maqashid Syariah (hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, and hifz al-mal) at the dharuriyyat (essential needs) level. Nevertheless, program implementation still faces operational challenges, including logistics and distribution distance, fluctuating raw-material prices, initial-stage socialization, and inter-agency coordination. This study concludes that the MBG Program produces a multiplier effect on health, education, household economy, and community religious values, and recommends strengthening logistics management, cross-institutional coordination, and more accurate beneficiary data collection.

Pendahuluan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemenuhan gizi sejak usia dini. Gizi yang tercukupi pada periode emas pertumbuhan anak berkontribusi langsung terhadap perkembangan fisik, kognitif, dan sosial yang menjadi fondasi pembangunan manusia jangka panjang. Meski demikian, masalah gizi termasuk stunting masih menjadi tantangan besar baik di tingkat nasional maupun daerah, tidak terkecuali di Kota Palembang. Data Kementerian Kesehatan RI (2022) mencatat prevalensi stunting nasional mencapai 21,6%, yang berarti sekitar satu dari lima anak Indonesia masih mengalami masalah gizi kronis. Angka tersebut menegaskan bahwa persoalan gizi bukan sekadar isu kesehatan individual, melainkan persoalan struktural yang membutuhkan intervensi kebijakan publik yang terukur dan berkelanjutan.

Menjawab tantangan tersebut, pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Program ini

dirancang tidak hanya sebagai intervensi gizi jangka pendek, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang terhadap kualitas generasi penerus bangsa. Meski demikian, implementasi program ini di lapangan termasuk di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang masih menghadapi sejumlah kendala. Berdasarkan penelusuran awal, setidaknya teridentifikasi empat persoalan pokok, yaitu, Ketidaktepatan sasaran penerima manfaat dan lemahnya sistem pendataan di tingkat lapangan, Distribusi bantuan yang belum sepenuhnya merata dan tepat waktu ke seluruh sekolah sasaran; Koordinasi antarinstansi kecamatan, sekolah, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih memerlukan penguatan dan Transparansi mekanisme penetapan penerima manfaat serta penggunaan anggaran yang belum optimal.

Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sebuah kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh baiknya rancangan program (*policy design*), tetapi juga oleh mutu implementasinya di lapangan (*policy implementation*). Sebagai ilustrasi dampak ekonomi program terhadap rumah tangga, rata-rata pengeluaran bekal atau jajan anak sebelum adanya MBG mencapai Rp15.000 per hari dana yang kini dapat dialihkan orang tua untuk kebutuhan lain, sebagaimana disampaikan salah satu wali murid dalam penelitian ini. Temuan awal ini mengindikasikan adanya potensi manfaat ekonomi mikro dari program yang perlu dikaji lebih lanjut kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Dari sudut pandang siyasah syar'iyah (fikih politik dan pemerintahan Islam), setiap kebijakan publik dituntut untuk menjunjung tinggi nilai keadilan (*al-'adl*) dan amanah dalam pengelolaannya. Kebijakan publik yang baik dalam perspektif Islam bukan hanya diukur dari aspek teknis-administratif semata, melainkan juga dari sejauh mana ia mewujudkan maslahah (kemaslahatan) bagi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji implementasi MBG di Kecamatan Alang-Alang Lebar tidak hanya dari perspektif teori implementasi kebijakan konvensional, tetapi juga dari kerangka *Maqashid Syariah* sebagai pisau analisis yang lebih holistik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) bagaimana implementasi Program MBG di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang; dan (2) bagaimana implementasi tersebut ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi MBG mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, distribusi, pendataan, dan kendala yang dihadapi serta menganalisis dan mengevaluasi implementasi tersebut berdasarkan empat nilai utama *Maqashid Syariah*, yaitu keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (masalah), amanah, dan transparansi.

Penelitian ini diharapkan memberikan dua kontribusi utama. Secara akademis, penelitian ini memperkaya kajian implementasi kebijakan publik dan ekonomi syariah, khususnya dalam mengintegrasikan teori implementasi kebijakan Barat dengan kerangka *Maqashid Syariah* pada studi kasus program gizi masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, pihak sekolah, masyarakat, serta menjadi rujukan awal bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan kajian serupa pada wilayah atau program yang berbeda.

Tinjauan Pustaka

1. Teori Implementasi Kebijakan dan Good Governance

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik, karena sebaik apa pun rancangan sebuah kebijakan, keberhasilannya sangat ditentukan oleh proses pelaksanaan di lapangan. Penelitian ini menggunakan model George C. Edward III, yang mengidentifikasi empat faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan sebagai berikut.

- a. Komunikasi kebijakan harus disampaikan secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami, baik oleh aparat pelaksana maupun kelompok sasaran. Komunikasi yang buruk berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan resistensi terhadap kebijakan.
- b. Sumber daya mencakup kecukupan sumber daya manusia (SDM), anggaran, informasi, serta sarana dan prasarana pendukung. Ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi prasyarat teknis keberhasilan implementasi.
- c. Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, kejujuran, dan tingkat penerimaan pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Disposisi yang rendah dapat menghambat implementasi meski sumber daya tersedia secara memadai.
- d. Struktur birokrasi meliputi pembagian tugas, standar operasional prosedur (SOP), dan mekanisme koordinasi antarlembaga yang jelas dan terorganisir, guna menghindari tumpang tindih maupun kekosongan tanggung jawab.

Selain model Edward III, penelitian ini juga menggunakan prinsip *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) sebagai instrumen evaluasi tambahan, yang meliputi lima aspek: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, serta keadilan. Kelima prinsip ini digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan MBG di Kecamatan Alang-Alang Lebar telah berjalan secara efektif, transparan, dan adil, sekaligus untuk memperkuat analisis kesesuaiannya dengan nilai keadilan dan amanah dalam Islam pada bagian pembahasan selanjutnya.

2. Ekonomi Syariah dan Lima Dimensi *Maqashid Syariah*

Ekonomi syariah berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis, dengan tujuan akhir mencapai *falāh*, yaitu kesejahteraan yang mencakup dimensi dunia sekaligus akhirat, melalui penegakan prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah, dan maslahah (Ramin, 2024). Untuk mengoperasionalkan nilai-nilai tersebut ke dalam analisis kebijakan publik, penelitian ini menggunakan kerangka *Maqashid Syariah* yang dikembangkan oleh Imam al-Syatibi, yang merumuskan lima unsur pokok kebutuhan dasar manusia (*al-dharuriyyat al-khams*) sebagai berikut.

- a. *Hifz al-Din* (menjaga agama) tercermin dari kehalalan bahan pangan yang digunakan serta pembiasaan doa sebelum makan sebagai bentuk penanaman nilai spiritual sejak dini.
- b. *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa) terwujud melalui pemenuhan gizi esensial bagi anak dan upaya pencegahan stunting maupun gizi buruk.
- c. *Hifz al-'Aql* (menjaga akal) berkaitan dengan dukungan terhadap perkembangan kognitif serta peningkatan konsentrasi belajar peserta didik.
- d. *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dipahami sebagai investasi terhadap kualitas gizi generasi penerus dalam jangka panjang.
- e. *Hifz al-Mal* (menjaga harta) tercermin dari pengurangan beban ekonomi dan pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan anak.

Kelima dimensi ini menjadi kerangka evaluatif yang komprehensif, karena tidak hanya menilai keberhasilan program dari aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut menjaga aspek-aspek fundamental kehidupan manusia sebagaimana dimaksud dalam *maqashid al-syari'ah*.

3. Kerangka Berpikir

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, kerangka berpikir penelitian ini disusun secara bertahap. Implementasi Program MBG di Kecamatan Alang-Alang Lebar terlebih dahulu dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) yang dipadukan dengan prinsip *Good Governance*

(transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas-efisiensi, dan keadilan). Hasil analisis tahap pertama tersebut kemudian dikaji lebih lanjut melalui kerangka *Maqashid Syariah* untuk menilai kesesuaiannya dengan lima dimensi dharuriyyat. Implementasi yang baik pada kedua tahap analisis ini diharapkan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, baik dari aspek material maupun spiritual.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif (Sugiyono, 2023). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara alamiah dan kontekstual tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel maupun kondisi di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan pemaknaan data. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, pada tahun 2026. Data yang digunakan berupa data kualitatif yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi nonpartisipatif, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi langsung di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi dari instansi terkait. Wawancara dilakukan kepada sembilan informan yang mewakili berbagai pemangku kepentingan, yaitu ahli gizi SPPG, lurah, kepala sekolah, orang tua/wali murid, siswa penerima manfaat, kader posyandu, tokoh agama, koordinator distribusi SPPG, dan Ketua TP-PKK. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis dilakukan secara terus-menerus hingga diperoleh temuan yang valid, sistematis, dan mampu menggambarkan implementasi Program Makan Bergizi Gratis serta kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif *Maqashid Syariah*

Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi dan Sasaran Program

Kecamatan Alang-Alang Lebar memiliki luas wilayah sekitar 34,58 km² dan terdiri atas lima kelurahan, yaitu Alang-Alang Lebar, Talang Kelapa, Srijaya, Karya Baru, dan Sukajaya. Secara sosial-ekonomi, mayoritas penduduk kecamatan ini bekerja di sektor perdagangan, jasa, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah ini berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN), yang bertanggung jawab penuh atas keseluruhan siklus program, mulai dari perencanaan menu, produksi, distribusi, hingga pengendalian mutu makanan.

Penelitian ini melibatkan sembilan informan yang dipilih untuk mewakili beragam perspektif pemangku kepentingan, yaitu ahli gizi SPPG, lurah, kepala sekolah SDN 14, orang tua wali murid, siswa penerima manfaat, kader posyandu, tokoh agama, koordinator distribusi SPPG, dan ketua TP-PKK. Keberagaman informan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran implementasi program secara komprehensif, dari sisi perencanaan kebijakan, pelaksana teknis, hingga penerima manfaat langsung. Data sekolah penerima manfaat di wilayah SPPG Alang-Alang Lebar disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sekolah Penerima Manfaat Wilayah SPPG Alang-Alang Lebar

Nama Sekolah	Jenjang	Penerima Manfaat
<i>SMP Negeri 52 Palembang</i>	SMP	1.107 siswa
<i>SD Negeri 241 Palembang</i>	SD	854 siswa
<i>SMA Negeri 22 Palembang</i>	SMA	790 siswa
<i>Total Penerima Manfaat</i>	—	2.751 siswa

Berdasarkan Tabel 1, total penerima manfaat Program MBG di tiga sekolah wilayah SPPG Alang-Alang Lebar mencapai 2.751 siswa, dengan proporsi terbesar berasal dari jenjang SMP. Cakupan lintas jenjang pendidikan ini menunjukkan bahwa program MBG dirancang untuk menjangkau kebutuhan gizi anak pada berbagai tahap perkembangan, dari usia sekolah dasar hingga menengah atas.

2. Alur Implementasi Program MBG di Lapangan

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa implementasi MBG di Kecamatan Alang-Alang Lebar berjalan melalui lima tahapan utama yang saling berkesinambungan, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Alur Implementasi Program MBG di Lapangan

No	Tahapan	Uraian Pelaksanaan
1	Perencanaan Menu	Disusun mingguan oleh ahli gizi SPPG berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG); menjaga keseimbangan karbohidrat, protein, sayur, dan buah; bahan baku bersertifikat halal.
2	Produksi & Higienitas	Dimulai pagi hari; tenaga produksi wajib menggunakan APD (penutup kepala, sarung tangan, masker); dapur diperiksa rutin oleh QC internal maupun BGN.
3	Distribusi	Menggunakan kendaraan dilengkapi cooler box; rute diatur berdasarkan jarak dan jam istirahat sekolah; pencatatan waktu keberangkatan-kedatangan.
4	Konsumsi & Pendampingan	Peserta didik makan di ruang khusus secara bergiliran, didampingi guru; pembiasaan doa sebelum makan & larangan mubazir (israf).
5	Monitoring & Evaluasi	Pengawasan mutu makanan, ketepatan distribusi, dan pelaksanaan program secara berkala sebagai bahan evaluasi berkelanjutan.

Kelima tahapan tersebut menunjukkan bahwa implementasi MBG di Kecamatan Alang-Alang Lebar telah memenuhi unsur struktur birokrasi dalam model Edward III, di mana pembagian tugas dan prosedur operasional standar berjalan secara terorganisir dari hulu (perencanaan) hingga hilir (evaluasi). Dari sisi dampak, temuan lapangan menunjukkan adanya peningkatan status gizi, konsentrasi belajar, dan kehadiran siswa, serta pengurangan beban ekonomi keluarga yang mengindikasikan bahwa faktor sumber daya dan disposisi pelaksana turut mendukung keberhasilan implementasi program pada tataran operasional.

3. Kesesuaian Implementasi MBG dengan *Maqashid Syariah*

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, temuan implementasi MBG selanjutnya dianalisis kesesuaiannya dengan lima dimensi *Maqashid Syariah*. Hasil analisis disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kesesuaian Implementasi MBG dengan Dimensi *Maqashid Syariah*

Dimensi	Indikator pada Program MBG	Sumber Informan
<i>Hifz al-Din (Agama)</i>	Bahan baku halal, proses sesuai thaharah, pembiasaan doa & larangan mubazir	Ahli Gizi SPPG; Tokoh Agama; Siswa
<i>Hifz al-Nafs (Jiwa)</i>	Peningkatan status gizi; pencegahan stunting & gizi buruk	Kader Posyandu; Peserta Didik
<i>Hifz al-'Aql (Akal)</i>	Peningkatan konsentrasi belajar, kehadiran & partisipasi siswa	Kepala Sekolah

<i>Hifz al-nasl</i> (Keturunan)	Investasi kualitas gizi generasi muda jangka panjang	Lurah Alang-Alang Lebar; Kader Posyandu
<i>Hifz al-Mal</i> (Harta)	Efisiensi pengeluaran rumah tangga untuk pangan anak	Orang Tua Siswa; Ketua PKK

Temuan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa implementasi MBG di Kecamatan Alang-Alang Lebar telah memenuhi kelima dimensi *al-dharuriyyat al-khams* secara simultan. Pada dimensi *hifz al-din*, kepatuhan terhadap kehalalan bahan baku dan pembiasaan doa sebelum makan mencerminkan penjagaan aspek spiritual dalam pelaksanaan program. Pada dimensi *hifz al-nafs*, program terbukti berkontribusi terhadap peningkatan status gizi dan pencegahan stunting, sebagaimana disampaikan kader posyandu dan peserta didik. Pada dimensi *hifz al-'aql*, kepala sekolah melaporkan adanya peningkatan konsentrasi belajar serta kehadiran siswa. Pada dimensi *hifz al-nasl*, program dipandang sebagai investasi jangka panjang terhadap kualitas gizi generasi penerus oleh lurah dan kader posyandu. Adapun pada dimensi *hifz al-mal*, orang tua siswa dan ketua PKK menyatakan bahwa program ini membantu efisiensi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan anak.

Dengan terpenuhinya kelima dimensi tersebut secara bersamaan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program MBG di Kecamatan Alang-Alang Lebar membentuk satu kesatuan masalah yang komprehensif pada tingkatan kebutuhan primer (*dharuriyyat*)—yakni tingkatan kebutuhan paling mendasar yang apabila tidak terpenuhi akan mengancam keberlangsungan kehidupan manusia. Temuan ini sekaligus menjadi bukti empiris bahwa sebuah kebijakan publik berbasis teknis-administratif dapat dirancang dan dilaksanakan selaras dengan nilai-nilai syariah tanpa mengorbankan efektivitas program itu sendiri.

4. Hambatan dan Tantangan Implementasi

Meskipun implementasi MBG di Kecamatan Alang-Alang Lebar secara umum berjalan baik dan telah memenuhi dimensi *Maqashid Syariah*, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah hambatan dan tantangan operasional yang masih dihadapi di lapangan, sebagaimana dirangkum pada Tabel 4.

Tabel 4. Hambatan dan Tantangan Implementasi Program MBG

No	Hambatan	Uraian
1	Logistik & Jarak Distribusi	Jarak dapur SPPG ke sebagian sekolah cukup jauh; kemacetan lalu lintas dan cuaca buruk berpotensi mengganggu ketepatan jadwal distribusi.
2	Fluktuasi Harga Bahan Baku	Kenaikan harga komoditas protein hewani (ayam/ikan) menuntut penyesuaian menu pengganti agar gizi tetap terpenuhi sesuai anggaran.
3	Sosialisasi & Penerimaan Awal	Pada tahap awal, sebagian masyarakat sempat ragu terhadap kualitas dan keamanan pangan yang disediakan.
4	Koordinasi Antarlembaga	Penyesuaian jadwal distribusi dengan jam istirahat tiap sekolah memerlukan komunikasi dan koordinasi intensif, khususnya di awal program.

Meninjau keempat hambatan pada Tabel 4 melalui model Edward III, dapat dipahami bahwa tantangan yang muncul lebih banyak bersifat teknis-operasional pada aspek sumber daya (logistik dan anggaran) serta struktur birokrasi (koordinasi antarlembaga), dan bukan pada aspek disposisi maupun komitmen pelaksana program. Hal ini menjadi indikasi positif, karena tantangan yang bersifat teknis relatif lebih mudah diatasi dibandingkan tantangan yang bersifat resistensi atau ketidakpatuhan pelaksana. Sejalan dengan prinsip *Good*

Governance, tantangan-tantangan ini secara bertahap dapat diatasi melalui penguatan koordinasi dan pembelajaran kelembagaan (*institutional learning*) antarpemangku kepentingan, sehingga kualitas implementasi program dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, dilaksanakan melalui tahapan perencanaan menu, produksi dan pengawasan higienitas, distribusi, konsumsi dan pendampingan, serta monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan program tersebut secara umum menunjukkan kesesuaian dengan model implementasi kebijakan Edward III dan prinsip *Good Governance*, meskipun masih terdapat sejumlah kendala operasional yang perlu mendapat perhatian.

Ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*, implementasi MBG menunjukkan kesesuaian dengan lima dimensi utama, yaitu *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Kesesuaian tersebut tercermin dalam penerapan prinsip kehalalan makanan, pemenuhan kebutuhan gizi, dukungan terhadap proses pembelajaran, perhatian terhadap kualitas generasi mendatang, serta potensi pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Dengan demikian, MBG memiliki potensi untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui keterpaduan aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan nilai-nilai keagamaan.

Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi tantangan berupa kendala logistik dan jarak distribusi, fluktuasi harga bahan baku, sosialisasi pada tahap awal, serta koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, keberlanjutan dan peningkatan kualitas implementasi MBG memerlukan penguatan tata kelola, koordinasi lintas pemangku kepentingan, serta pengawasan yang berkesinambungan. Penelitian ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan dalam pelaksanaan kebijakan publik agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh para pemangku kepentingan. Pertama, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu memperkuat manajemen logistik dan menjalin kemitraan jangka panjang dengan pemasok pangan lokal untuk mengantisipasi fluktuasi harga bahan baku serta kendala distribusi. Kedua, pemerintah kecamatan dan kelurahan perlu mengoptimalkan koordinasi, pengawasan, dan komunikasi berkala antarlembaga guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Ketiga, pihak sekolah dan orang tua perlu berpartisipasi dalam meningkatkan akurasi pendataan penerima manfaat, menyediakan fasilitas makan yang memadai, serta menanamkan kebiasaan konsumsi pangan bergizi dan perilaku tidak berlebihan kepada peserta didik. Keempat, tokoh agama dan organisasi masyarakat diharapkan turut mengawal pelaksanaan program agar senantiasa berlandaskan nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Kelima, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* serta memperluas cakupan wilayah penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi dan manfaat Program MBG dalam perspektif *Maqashid Syariah*.

Daftar Pustaka

Agustini, U. (2025). Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Intervensi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 4(3), 362–368. <https://doi.org/10.33578/kpd.v4i3.p362-368>

- Al Ghifari, M. H., & Priyatno, P. D. (2024). The Urgency of Implementing Halal Product Process Assistance: Review of *Maqashid Syariah*. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1), 14–30.
- Al-Butary, B. (2021). Maqasid Sharia Implementation in Monetary Policy: A Literature Study. *El-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(2).
- Alami, F. N., & Mohammad, W. (2024). Maqasid Al-Sharia Application on Food Security in Indonesia. *Seriat Ekonomisi*, 1(3), 95–102.
- Andini, S. T. (2025). A Policy Implementation Review of the Free Nutritious Meal Program (MBG). *Jurnal Implementasi Kebijakan Publik*, 1–20.
- Ar Rumi, A. J., & Udzma, H. (2025). Makan Bergizi Gratis dalam Prespektif Hadis (Kajian Ma'anil Hadis). *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 67–79. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v7i1.26628>
- Arikunto, S. (2021). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Arriza, M. H. (2026). Implementasi Maqasid Syariah dalam Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, 2(2), 1407–1420. <https://doi.org/10.63822/sn7wj386>
- Basit, M., & Ramadani, H. (2025). Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Perkembangan Ekonomi. *Journal of Economics Development Research*, 1(2), 49–54.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dalimunthe, S. S. (2026). Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Analisis Kebijakan Pemerintah dan Relevansinya dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Brilliant: Journal of Islamic Economics and Finance*.
- Desiani, N., & Syafiq, A. (2025). Efektivitas Program Makan Gratis pada Status Gizi Siswa Sekolah Dasar: Tinjauan Sistematis. *Malahayati Nursing Journal*, 7(1), 27–48.
- Fitriyanto, R. E., Rahmawaty, F. J., & Occifa, G. A. (2023). Screening of Nutritional Status and Education on Balanced Nutrition for Boarding School Students. *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 89–95. <https://doi.org/10.12928/jpm.v6i3.5393>
- Hardani, H., Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu.
- Jalil, M. I. A. (2023). Empowering Food Security Through Waqf. *Labuan e-Journal of Muamalat and Society*, 17(1), 45–67.
- Kasri, N. S., Bouheraoua, S., & Mohamed Radzi, S. (2023). *Maqasid al-Shariah and Sustainable Development Goals Convergence: An Assessment of Global Best Practices*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhyidin, A., & Syarofi, M. (2026). Relevansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia dengan Prinsip *Maqashid Syariah*: Hifz al-Nafs. *Journal of Innovative and Creativity*, 6(1), 5214–5220. <https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.7506>

- Nuraini, I., Mawardi, M., & Sutopo, H. (2025). Systematic Literature Review (SLR): Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif *Maqashid Syariah*. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 10(2), 262–276. <https://doi.org/10.37366/jespb.v10i02.2419>
- Nurmansyah, M. I., & Fitriani, A. (2025). Applying an Implementation Research Lens to Indonesia's Free Nutritious Meal Program. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 13(2), 133–141. <https://doi.org/10.20473/jaki.v13i2.2025.133-141>
- Ramin, Moh. (2024). Dampak Perubahan Demografis Tahun 2024 Terhadap Dinamika Ekonomi Global. *CURRENCY: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 389–404. <https://doi.org/10.32806/ccy.v3i1.330>